



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KUTACANE

JALAN BLANGKEJEREN KM. 3,5 KUTACANE 24652
TELEPON (0629) 21217 21840 FAKSIMILI (0629) 21222

Nomor : S-717/WPB.01/KP.06/2018 16 Juli 2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permintaan Data Dalam Rangka Penyusunan Kajian
Fiskal Regional Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2018

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Tenggara
di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional serta Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Nomor S-1421/WPB.01/2018 tanggal 11 Juli 2018 hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka menyusun Kajian Fiskal Regional Provinsi Aceh Tahun 2018 yang dilaporkan secara periodik maka diperlukan data realisasi belanja daerah;
2. Adapun data yang masih diperlukan dalam rangka penyusunan Kajian Fiskal Regional dimaksud antara lain berupa:
 - a) Profil Pagu dan Realisasi APBD Kabupaten Aceh Tenggara sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 berdasarkan klasifikasi ekonomi, fungsi dan urusan;
 - b) Perkembangan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah berupa profil dan jenis layanan BLU Daerah serta realisasi anggarannya.
3. Berkenaan hal-hal tersebut di atas, kami harapkan bantuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Tenggara untuk menyediakan data-data dimaksud sebagai bahan Penyusunan dan Pelaporan Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh (**sebagaimana format terlampir**);
4. Laporan berkenaan kiranya dapat disampaikan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, *softcopy* dapat dikirimkan melalui e-mail pd.kppn105@gmail.com dan *hardcopy* agar dikirimkan ke KPPN Kutacane. Data *softcopy* dan *hardcopy* dikirimkan **paling lambat tanggal 20 Juli 2018**.

Demikian disampaikan, atas perhatian, bantuan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Andi Permadi

NIP 19711227 199301 1 001

Tembusan:

→ Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Profil APBK Kab/Kota

Berdasarkan Klasifikasi Urusan (Dalam Jutaan)

No	Fungsi	Triwulan I TA 2018		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Pemerintahan Umum			
2	Pendidikan			
3	Pekerjaan Umum			
4	Kesehatan			
5	Pertanian			
6	Kelautan dan Perikanan			
7	Kehutanan			
8	Perhubungan			
9	Sosial			
10	Lingkungan Hidup			
11	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
13	Perencanaan Pembangunan			
14	Perindustrian			
15	Ketahanan Pangan			
16	Kebudayaan			
17	Tenaga Kerja			
18	Pemuda dan Olah Raga			
19	Energi dan Sumberdaya Mineral			
20	Kependudukan dan Catatan Sipil			
21	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
22	Kearsipan			
23	Perumahan			
24	Pemberdayaan Perempuan			
25	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
26	Pertanahan			
27	Penataan Ruang			
28	Perdagangan			
29	Penanaman Modal			
30	Perpustakaan			
31	Pariwisata			
32	Komunikasi dan Informatika			
33	Kepegawaian			
34	Transmigrasi			
35	Statistik			
TOTAL				

— Profil dan Jenis Layanan BLU Daerah

Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2018 (Dalam Jutaan)

No	Jenis Layanan	Satker BLUD	Nilai Aset	PNBP		RM (APBK)	
				Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Profil APBK Kab/Kota

Berdasarkan Klasifikasi Fungsi (Dalam Jutaan)

No	Fungsi	Triwulan I TA 2018		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Pelayanan Umum			
2	Ketertiban dan Ketentraman			
3	Ekonomi			
4	Lingkungan Hidup			
5	Perumahan dan Fasilitas Umum			
6	Kesehatan			
7	Pariwisata dan Budaya			
8	Agama			
9	Pendidikan			
10	Perlindungan Sosial			
TOTAL				

Profil APBK Kab/Kota

Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (Dalam Jutaan)

URAIAN	Triwulan I.TA 2018		
	Pagu	Realisasi	%
PENDAPATAN			
PAD			
Pajak daerah			
Retribusi daerah			
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
Zakat/Infaq/Sedekah			
Lain-lain PAD yang sah			
Dana Perimbangan			
DBH			
DAU			
DAK			
Tambahan Migas			
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
Hibah			
Dana darurat			
DBH pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya			
Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
Bantuan keu. dari Provinsi atau Pemda lainnya			
Lain-lain			
BELANJA			
Belanja Tidak Langsung			
Belanja Pegawai			
Belanja Bunga			
Belanja Subsidi			
Belanja Hibah			
Belanja Bantuan sosial			
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes			
Belanja Bantuan Keu kpd Prov/Kab/Kota & Pemdes			
Belanja tidak terduga			
Belanja Langsung			
Belanja Pegawai			
Belanja Barang dan jasa			
Belanja Modal			
PEMBIYAAAN NETTO			
Penerimaan Pembiayaan			
SILPA TA sebelumnya			
Pencairan dana cadangan			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
Penerimaan dari Investasi Non Pinjaman			
Pengeluaran Pembiayaan			
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah			
Pembayaran Pokok Utang			
Pemberian Pinjaman Daerah			
Pembayaran Kegiatan Lanjutan			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga			